

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lingkungan hidup baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke 4, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dari pihak pemerintah dan seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan masalah ini berkewajiban untuk bisa menjalankan tugas semana mestinya yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Dalam melakukan perlindungan dalam masalah lingkungan hidup perlu adanya pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia bisa tetap menjadi penunjang hidup bagi masyarakat Indonesia serta makhluk hidup yang lainnya.

Permasalahan dari penggunaan kantong plastik semakin menjadi perhatian masyarakat. Sebenarnya kantong plastik bukan suatu kebutuhan primer, karena setelah digunakan oleh konsumen kemudian dibuang dan tidak dikonsumsi lebih lanjut. Kantong plastik mulai banyak digunakan sejak masuknya supermarket ke kota-kota besar. Lebih dari 17 miliar kantong plastik dibagikan supermarket di seluruh dunia. Kantong plastik sudah menjadi bagian dalam keseharian masyarakat. Penggunaan kantong plastik sebagai pembungkus dan untuk membawa barang belanjaan adalah alternatif yang praktis dan ringkas baik di pasar tradisional maupun supermarket.

Penggunaan produk plastik secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup serius. Sampah plastik tidak hanya menjadi masalah di perkotaan, namun juga di lautan dan sungai. Dampak negatif berbahaya plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, membunuh berbagai hewan dilindungi, tetapi juga merusak lingkungan secara sistematis. Jika tidak dikelola serius, pencemaran sampah jenis ini akan sangat berbahaya bagi kelanjutan planet bumi. Sampah plastik adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Plastik merupakan produk serbaguna, ringan, *fleksibel*, tahan kelembaban, kuat, relatif murah. Karena berbagai kemudahan tersebut, seluruh dunia bernafsu untuk menghasilkan lebih banyak produk berbahan baku plastik. Namun, tanpa disadari, karakter dasar plastik, ditambah cara penggunaan yang tidak ramah lingkungan, ia justru merusak lingkungan hidup.

Terutama sampah kantong plastik, di Indonesia sendiri memiliki masalah serius dengan sampah kantong plastik. Setiap tahun di Indonesia, rata-rata pemakaian kantong plastik perorang adalah 700 lembar, sehingga sekitar 100 miliar kantong plastik dikonsumsi setiap tahunnya. Dengan masalah ini perlu adanya tindakan dari pihak pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi masalah ini sudah melakukan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai bentuk pencegahan,

penanggulangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Kota Bandung yang diakibatkan oleh sampah, khususnya sampah kantong plastik.

Banyak sungai-sungai besar di Indonesia yang sangat memprihatinkan, diantaranya sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar Jawa Barat yang sekarang sedang sangat tidak sehat dikarenakan begitu banyaknya sampah yang menumpuk di sungai tersebut. Sungai-sungai dan selokan-selokan di Indonesia tersumbat oleh botol, tas dan kemasan plastik lainnya. Untuk mengatasi masalah sampah di Citarum sampai mengerahkan bala bantuan dari pihak tentara dimana mereka bergotong royong membersihkan aliran sungai dari sumbatan sampah. Komandan unit militer di Kota Bandung menggambarkannya sebagai “musuh terbesar kita”. Seperti banyak negara berkembang, Indonesia dikenal bukan urusan positif, namun karena kerepotan dalam mengatasi gunung-gunung sampah.

Ledakan jumlah penduduk antara lain berdampak pada merajalelanya wadah, pembungkus, serta kantong plastik yang menggantikan kemasan alami dan tradisional yang mudah terurai di alam seperti daun pisang. Akibatnya, upaya pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mengelola sampah tidak mampu mengikuti ekspansi dramatis dari sampah yang dihasilkan warga. Budaya lama membuang sampah ke selokan dan sungai menunjukkan bahwa setiap upaya untuk membersihkan lingkungan membutuhkan perubahan besar dalam pola pikir masyarakat.

Seiring dengan perkembangan pembangunan kota, populasi penduduk, industri, pertumbuhan jumlah sampah plastik dipastikan akan meningkat. Perlu antisipasi dan pengelolaan secara menyeluruh untuk mencegah kerusakan

lingkungan hidup akibat sampah plastik. Pengelolaan tersebut harus mengatasi sumber atau penyebab terjadinya pencemaran sampah plastik. Karena sampah plastik ini bisa menimbulkan banyak permasalahan dimana diantaranya adalah : mengganggu rantai makanan, pencemaran air tanah, mencemari tanah, menyebabkan polusi udara, membunuh hewan, beracun, biaya penanggulangan mahal, penurunan wisata.

Saat ini Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak 1.500 ton per hari, dengan komposisi organik (60%) dan anorganik (40%). Dimana 20% adalah sampah yang berasal dari plastik. Warga Kota Bandung dapat menghasilkan 150 ton sampah plastik per hari di mana salah satu bentuk dari sampah plastik adalah sampah kantong plastik. Selain itu, diperkirakan setiap orang menghasilkan 150 sampah kantong plastik atau sekitar 450 juta kantong plastik per bulan dan 3 juta penduduk yang beraktifitas di Kota Bandung, jumlah ini di perkirakan akan terus bertambah dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan bisa sampai dengan ratusan tahun karena sampah plastik ini bersifat kumulatif.

Dalam menjalan kebijakan ini, perlu adanya pengawasan dan pembinaan dari pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat juga perlu bekerjasama dengan pemerintah terkait dalam menjalan kebijakan Peraturan Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

**Table 1.1**

### Daftar Supermarket di Kota Bandung

No.	Nama	Jumlah Gerai
1.	Pusat Perbelanjaan/Mall	29
2.	Indogrosir	1
3.	Yomart Grosir	1
4.	Giant	5
5.	Hero	1
6.	Matahari	3
7.	Lotte	2
8.	Carrefour	2
9.	Superindo	6
10.	Borma	13
11.	Griya/Yogya	27
12.	Indomart	184
13.	Alfamart	247
14.	Cirkle K	47
15.	Yomart	61
16.	SB Mart	27
17.	Lain-lain/Perorangan	49
<b>Jumlah Total</b>		<b>705</b>

*Sumber: Dinas Koperasi UKM&Perindustrian Perdagangan yang di olah oleh penulis*

Dari beberapa TPS yang ada di Kota Bandung terhadap semua sampah plastik, sampah kantong kresek ternyata merupakan sampah plastik terbanyak (sekitar 50%), kemudian sampah kemasan produk bermerk (42%) dan sampah plastik lembaran bening yang tidak bermerk (8%). Hal tersebut tidak terlepas dari kebiasaan buruk dari masyarakat dimana ketika melakukan pembelian ke

Supermarket dan tempat perbelanjaan lainnya tidak membawa tas belanjaan sendiri, sehingga pihak gerai sendiri menyediakan tas (kantong kresek) sebagai wadah belanjaan mereka. Hampir setiap gerai supermarket yang ada di Kota Bandung menghabiskan kurang lebih 2.000 lembar kantong plastik per hari sebagai wadah barang belanjaan para konsumen.

Dari keseluruhan Supermarket yang ada di Kota Bandung, hampir semua Supermarket menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus belanjaan. Walaupun sudah jelas di tempat kasir dan beberapa sudut Supermarket tertera peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik bagi konsumen. Adapun beberapa Supermarket sudah menerapkan kantong belanjaan berbayar selebar seharga Rp.200/ plastik.

Berdasarkan data di atas, jumlah keseluruhan Supermarket yang ada di Kota Bandung mencapai 54 gerai. Dari seluruh gerai yang ada, masih banyak diantaranya yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus barang belanjaan para pembeli. Dengan adanya hal ini, perlu pengawasan dan pembinaan yang lebih tegas dari pihak pemerintahan terhadap beberapa Supermarket yang ada di Kota Bandung agar kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini bisa berjalan lebih baik lagi.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ayat ke-1 Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan

Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan yang di muat dalam ayat ke-3 Pasal 22, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi
- b. Konsultasi
- c. Pelatihan
- d. Bantuan teknis; dan
- e. Hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Selain itu dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam melakukan pengawasan, menyertakan bahwasannya walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap :

- a. Produsen
- b. Pelaku Usaha
- c. Penyedia Kantong Plastik
- d. Pengguna Kantong Plastik

Dalam melakukan pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut, maka walikota Kota Bandung dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Surat Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Unsur yang dimaksud yaitu Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Polisi Pamong Praja (Pol PP), Industri dan Perdagangan (INDAG), dan Badan Hukum Kota Bandung. Terkait pelaksanaan kebijakan tersebut merekalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap sasaran guna mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut dapat terwujud.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian guna melihat keberlangsungan kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melihat sejauh mana kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD terkait terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Untuk mengurangi tingkat pemakaian kantong plastik di Kota Bandung yang sekarang masih cukup tinggi penulis perlu melakukan sebuah penelitian agar mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masih banyaknya sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bandung dan sasaran dari kebijakan tersebut dengan mengambil fokus permasalahan yang ada di Supermarket terlebih dahulu walaupun hampir setiap sisi menggunakan kantong plastik. Serta untuk mengetahui mengapa SKPD terkait kebijakan tersebut saat ini sudah tidak lagi menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian ini di Supermarket dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Supermarket Di Kota Bandung”**



## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan di atas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik di lingkungan sekitar sehingga terkait Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung belum bisa direalisasikan sepenuhnya.
2. Di Kota Bandung sendiri pun masih banyak supermarket yang masih menggunakan kantong plastik sehingga banyaknya sampah plastik yang menumpuk di beberapa kecamatan Kota Bandung.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung?
3. Solusi apa yang bisa menyelesaikan hambatan dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan SKPD terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung.
3. Untuk mencari solusi apa yang bisa menyelesaikan hambatan dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung.

#### **E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara langsung atau secara tidak langsung. Dengan ini penulis menggolongkan beberapa golongan terkait penelitian ini :

1. Secara Praktis

Dalam hal ini semoga pihak pemerintah bisa lebih baik lagi dalam menangani masalah pengurangan penggunaan kantong plastik pada supermarket di Kota Bandung. Kemudian, semoga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat agar bisa memahami dampak dan masalah apasaja yang dapat timbulkan dari sampah plastik.

2. Secara Teoritis

Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengatasi sampah plastik. Khususnya terkait

Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Administrasi Publik adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang cara pengelolaan suatu organisasi publik/umum dalam konteks kehidupan bernegara yaitu, lembaga Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.

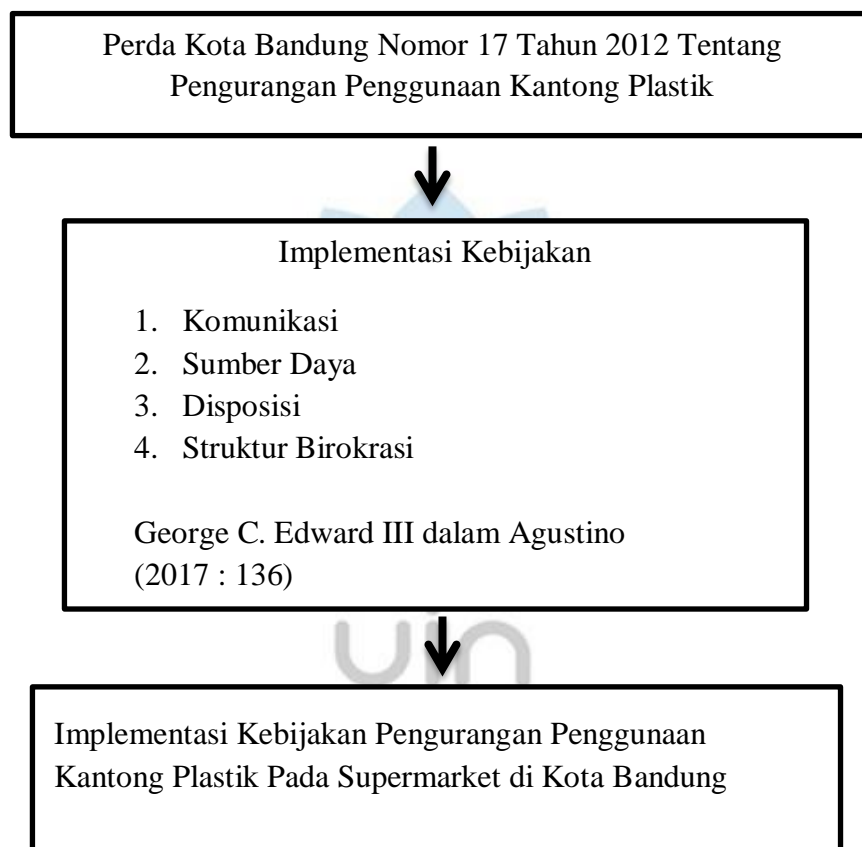
Dalam proses Implementasi Publik, Implementasi Kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Model implementasi kebijakan publik oleh George C. Edward III dalam Leo Agustino dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2017 : 136) Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Dari keempat dimensi diatas memberikan suatu kejelasan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat tercapai dengan kemampuan komunikasi yang baik dan benar dari pelaksana kebijakan, keahlian dari sumberdaya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, perilaku dari para

pelaksana kebijakan serta kemampuan dalam menyusun birokrasi yang sesuai dengan tujuan dan target dari kebijakan. Keempat dimensi ini sangat penting dan saling berkaitan dalam menjalankan suatu kebijakan agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**